

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.¹

Menurut Toto Wardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.² Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.³

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan

¹Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.3

² Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.61

³Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*.(Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997), hal.182

utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.⁴ Dari beberapa pengertian menurut beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok yang lemah di dalam masyarakat sehingga menjadi berdaya melalui berbagai kegiatan baik melalui motivasi, dorongan dan peningkatan pengetahuan, serta menggali kemampuan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Seperti halnya pemberdayaan merupakan proses pribadi karena masing-masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal.

Pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis. Dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu individu maupun kolektif guna untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terdapat di dalam individu dan kelompok masyarakat, sehingga mampu melakukan transformasi social.

Pemberdayaan dapat dilihat dari setiap manusia dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan dapat

⁴ M.Atsil.M.A,"Pengembangan.....,hal.43

diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan , ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.⁵

Dalam proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan

⁵ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011),hal.31-32

diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.

Menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Alfitri pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu :⁶

1. Pemungkinan

Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.

2. Penguatan

Yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.

3. Perlindungan

Yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

⁶ Alfitri, "Community Development" Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.26-27

4. Penyokongan

Yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.

5. Pemeliharaan

Yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didistribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

Maka secara operasional pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses memampukan dan memandirikan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar tidak ketergantungan dengan pemberian pemerintah. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan

kelompok terabaikan lainnya. Dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

B. Pengembangan Ekonomi

Dalam konsep pengembangan masyarakat terkandung kata pemberdayaan yaitu upaya untuk membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan menjadi prinsip utama dalam mengembangkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan setiap program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upaya sendiri.⁷

Aktifitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang

⁷M.Atzil.M.A,"Pengembangan.....,hal.45

diindikasikan dengan tersediannya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terbedayakannya masyarakat.⁸

Menurut Baonewidjojo yang dikutip oleh Ayub, menyimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu, 1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, 2) meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat, 3) meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, 4) menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, 5) membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya, serta 6) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁹

Menurut Kartasasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹⁰

Menurut Fellmann yang dikutip oleh Andrianisari pengertian pengembangan adalah: 1) Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang. 2) Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi

⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana,2006),hal.72

⁹ Ayub M. Padangaran, *Manajemen.....*, hal.31

¹⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : Cides, 1996), hal.142

barang (materi) dan konsumsi. Pembangunan atau pengembangan pedesaan (*rural development*), menurut Mosher, dapat mempunyai tujuan: 1) Pertumbuhan sector pertanian, 2) Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, 3) Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu di bagi-bagi kepada seluruh penduduk.¹¹

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam strategi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, antara lain :

1. *Direct Contact* (bertatap muka langsung dengan sasaran)

¹¹ Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai", *Repository Universitas Sumatera Utara*, 2017, hal.16, diakses pada tanggal 12 Juli 2018

Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

2. *Demonstrasi Hasil* yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara lama yang mereka kuasai.
3. *Demonstrasi proses* adalah memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru.
4. Paksaan Sosial adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.¹²

Selain strategi diatas, ada strategi pendekatan konservatif yang berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam parameter konvensional. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi konservatif adalah melalui :

¹² Supriyati Istiqamah, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 2008), hal.45

Pertama menarik industri, pendekatan ini berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi *mainstream* dengan cara menghimpun inisiatif. Pendekatan ini mencoba menarik industry baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan bagus untuk berinvestasi.

Kedua memulai industry lokal, pendekatan ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian serta penafsiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu dan kemudian memutuskan apa jenis industry baru yang akan berhasil.

Ketiga pariwisata, mempromosikan pariwisata menjadi alternative yang menarik, pariwisata akan menjadi sumber daya yang potensial yang dapat mendatangkan penghasilan, dan juga sebagai industry bersih yang tidak menimbulkan polusi serta dapat mendukung terbukanya tenaga kerja.¹³

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya.

¹³ Jim Ife, *Community*..... hal.424-426

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :

1. Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada di dalamnya dengan tujuan meningkatkan produktifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisien usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan.
2. Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric.
3. Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.
4. Permodalan, yang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
5. Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistenitas, keberlanjutan usaha yang akan dilaksanakan.¹⁴

¹⁴ Toto Mardikanto, *Pemberdayaan*.....hal .225

C. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Asset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dan pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan

¹⁵ UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa.¹⁶

BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁷

BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam membantu perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup dan digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi.¹⁸

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hal.35

¹⁸Andriani Sari,"*Pengaruh.....*hal.25

bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.²⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberadaaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya

¹⁹ M.Atsil.M.A, "Pengembangan..... hal.53

²⁰ Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.hal.4

dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.²¹

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berknaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES

²¹ M.Atzil.M.A,*Pengembangan.....*Hal.54

adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

D. Konsep Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat teraksana sedemikian rupa.
5. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak

diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.²²

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”.

Penelitian Dewi Kirowati dan Lutfiah Dwi S. bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa Temboro Kecamatan Keras Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Penelitian tersebut menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu manfaat pengembangan BUMDes dapat dirasakan warga desa Temboro dengan terciptanya usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes yang meliputi kepercayaan, jaringan yang berbentuk tanggung renteng yang merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama dan norma yang tercermin saling bantu membantu dalam pengelolaan BUMDes desa Temboro

²² Dantika Ovi Era Tama dan Yanuadi, “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, diakses pada tanggal 09 Mei 2019

Kecamatan Keras Kabupaten Magetan. Perbedaan dengan penelitian ini tidak ada objek pemberdayaan masyarakat dan meneliti peran modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian berupa pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes.²³

Penelitian Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari bertujuan untuk mengetahui program pemerintah yaitu BUMDes yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa peran pemerintah desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta pengawasan. Perbedaan dengan penelitian ini objek penelitian berupa peran pemerintah dalam mengelola BUMDes. Persamaan dengan penelitian ini meneliti tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.²⁴

Penelitian M.Atzil.M.A bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten pasewaran. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian

²³ Dewi Kirowati dan Lufiah Dwi S. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal Jurusan Akuntansi dan Sistem Informasi Politeknik Negeri Madiun*, vol.1,2018, diakses pada tanggal 02 Juli 2018

²⁴ Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, "Peran Pemerintah Desa Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*, Vol. 05 No.02,2016, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018

tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang merupakan kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit usaha tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. Perbedaan penelitian ini tidak meneliti strategi pemberdayaan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini pengembangan ekonomi melalui BUMDes dan menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁵

Penelitian yang ditulis oleh Andriani Sari bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagei yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pengaruh BUMDes terhadap pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Persamaan dengan penelitian ini meneliti tentang pengembangan ekonomi melalui BUMDes dan menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁶

²⁵ M.Atsil.M.A., "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran", *Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2017, diakses pada tanggal 3 Juli 2018

²⁶ Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai", *Repository Universitas Sumatera Utara*, 2017, diakses pada tanggal 12 Juli 2018

Penelitian yang di tulis oleh Dodi Yudiardi bertujuan untuk mengetahui sektor perekonomian Kabupaten Garut didominasi oleh sektor pertanian yang berbasis di perdesaan namun pertumbuhannya sangat lamban. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil dari penelitian tersebut yaitu berbagai progam pemerintah untuk pengembangan ekonomi antara lain Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), serta progam UPK-PKP-PKK sudah digulirkan untuk memperkuat perekonomian di Desa namun hasilnya belum memuaskan. Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah. Perumusan strategi pengembangan BUMDes dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal BUMDes. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki BUMDes. Pembentukan ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan lain merupakan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan BUMDes. Urutan strategi pengembangan manajemen BUMDes selanjutnya adalah diversifikasi produk, penetrasi pasar, pengembangan produk BUMDes, dan pelatihan karyawan. Perbedaan dengan penelitian ini tidak meneliti strategi pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode penelitian analisis SWOT.

Persamaan dengan dengan penelitian ini meneliti strategi dalam pengembangan BUMDes.²⁷

Penelitian yang ditulis Ratna Azis Prasetyo bermaksud untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan megambil studi kasus di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes yang secara garis besar tujuan dari penelitian adalah : untuk mengetahui bentuk keterlibatan perangkat desa dan masyarakat Desa dalam pemanfaatan dana BUMDes, mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes, mengetahui kontribusi BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih rendah, hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat tentang progam BUMDes. Keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.²⁸

²⁷ Dodi Yudiardi, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan Kabupataten Garut”, *Jurnal Jurusan Administrasi Publik Universitas Garut*, 2015, diakses pada tanggal 23 Juli 2018

²⁸ Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Jurusan Sosiologi Universitas Airlangga*, Vol. XI No. 1, 2016, diakses pada tanggal 27 Juli 2018

F. Kerangka Berpikir

Kendala BUMDes :

1. Minimnya modal
2. Belum tersedianya Gudang dan Tempat usaha
3. Susahnya mencari Induk unggul untuk membuat pembibitan perikanan
4. Sempitnya lahan pasar
5. Minimnya tenaga ahli / Sumberdaya Manusia
6. Masih perlunya pengenalan dan penyadaran kepada masyarakat terkait BUMDes

Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan ekonomi:

1. Pengenalan BUMDes kepada masyarakat
2. Mendirikan unit-unit usaha
3. Pelatihan kewirausahaan
4. Perbaikan infrastruktur
5. Penggalan potensi untuk pendirian unit-unit usaha baru

Hasil yang diharapkan:

1. Membantu pendirian usaha baru melalui pinjaman modal
2. Menambah PAD
3. Memberikan lapangan kerja pada masyarakat
5. Mensejahterakan masyarakat
6. Memberikan fasilitas yang baik untuk masyarakat
7. Mensejahterakan masyarakat
8. Menjadi desa yang mandiri

